



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UIP NUSA TENGGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHIDIN
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 461494

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/200 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/60 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/60 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/75 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 817.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV TURBO 1500 CC SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SUV Tahun 2022, LAINNYA Rp. 405.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.693.548.512



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.075.048.512
III. HUTANG	Rp.	203.272.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.871.776.012

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.